

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2012.
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Pemilu dan Sengketa Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2009.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia., 2016. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
- , Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurainun Mangungsong, Hukum Tata Negara I, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010.
- Newman, William H. Administrative Action: A Program of Study for Management. New Jersey: Prentice-Hall, 1950.
- Pusat Penelitian DPR RI. Upaya Pengawasan Ruang Digital dalam Pilkada 2024. Jakarta: DPR RI, 2024.
- Sondang P. Siagian, *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi Aksara., 2018
- Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung, 2006.
- William H. Newman, *Administrative Action*. New Jersey: Prentice Hall.

Jurnal

- Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 01 (2023): 125–39. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10>.
- A. Zarkasi, "pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024", *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3 (2024)
- Amelia, Desi. "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye Digital Pada Pemilu 2019." *Jurnal Demokrasi dan Pemilu* 2, no. 1 (2020): 85–97.

Banurea, Oda Kinata. “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 4, no. 1 (2023): 21–34.

Hadi, Syofyan. “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat).” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 261 (2018): 259–266. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

Melia Surya Dharma dan Syamsir Bustanuddin. “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 3, 2022.

Muhammad Ichsan. “Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Nurhardinato, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal TAPIS* 11 (2015): 1–10.

Siregar, Taufik. “Kesiapan Regulasi Dalam Mengawasi Kampanye Politik Digital.” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 7, no. 2 (2022): 145–157.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

----- . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

----- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

----- . Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

----- . Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

----- . Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.

Internet

Media Jambi News, “Bawaslu Jambi Catat 28 Akun Media Sosial Langgar Aturan Kampanye”, <https://mediajambinews.com>

Jambi Times, “Pelanggaran Kampanye Digital Masih Marak, Pengawasan Belum Optimal,” <https://www.jambitimes.id/>

Jernih.id. “Puluhan Pelanggaran Ditemukan Bawaslu pada Tahapan Kampanye Pilkada Jambi 2024. <https://www.jernih.id/puluhan-pelanggaran-ditemukan-bawaslu-pada-tahapan-kampanye-pilkada-jambi-2024>

Kompas, “Bawaslu Provinsi Jambi Hapus Konten Hoaks Kampanye Digital,” <https://www.kompas.com>